PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR :KPTS/ 12 /DPRD-PB/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Pesisir Barat Nomor : 100.3.2/3747/03/2025 Tanggal 4 November 2025 Perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Propemperda Tahun 2026 oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026.

Kesatu : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026. Sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 07 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,

KETUA DPRD KAB. PESISIR BARAT

MOHAMMAD EMIR LIL ARDI

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Barat

Nomor : KPTS/ 12 /DPRD-PB/2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru
2.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Baru
3.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru
4.	Pembentukan Pekon Kuta Mulya Kecamatan Bengkunat	Bagian Pemerintahan	Lanjutan
5.	Pembentukan Pekon Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan	Bagian Pemerintahan	Lanjutan
6.	Pembentukan Pekon Cukuh Bunjak Kecamatan Pesisir Selatan	Bagian Pemerintahan	Lanjutan
7.	Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pedagang Kaki Lima	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Lanjutan
8.	Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Baru
9.	Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan	Inisiatif DPRD	Baru
10.	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	Inisiatif DPRD	Lanjutan
11.	Pengembangan Budaya Literasi	Inisiatif DPRD	Lanjutan

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RAPERDA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2026

1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2027	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baru

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 07 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,

KETUA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT

MOHAMMAD EMIR LIL ARDI

Dipindai dengan CamScanner